

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

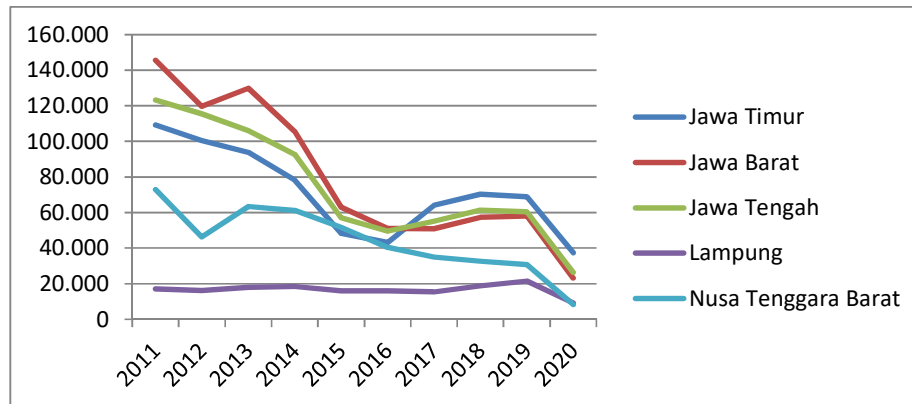
Kecenderungan masyarakat pada umumnya di era globalisasi adalah beraktualisasi diri atau ingin memenuhi aspek kehidupan. Globalisasi telah membuat perbatasan antar Negara menjadi lebih mudah dan juga menghilangkan rintangan seperti sulitnya biaya pindah, batasan regional, dan hambatan transportasi. Hilangnya hambatan tersebut mendorong seseorang untuk bermigrasi secara internasional. Sudah sejak lama kegiatan migrasi antar negara terjadi. Sebagai dasar pengambilan keputusan migrasi, tujuan migrasi berkaitan langsung dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian dari proses migrasi. Kondisi ekonomi yang berbeda di suatu negara merupakan faktor terjadinya migrasi (Irawanti et al., 2018).

Menurut Everett S. Lee (1966) mengemukakan dalam teorinya yaitu *Push-Pull Model* yang dimana dikatakan bahwa volume migrasi ditentukan adanya faktor yang mendorong dan faktor yang menarik. Berkaitan dengan faktor pendorong berasal dari daerah asal sedangkan faktor penarik yang berkaitan dengan daerah tujuan. Selain itu juga dikatakan adanya faktor rintangan dan faktor pribadi atau individu sebagai keputusan seseorang dalam melakukan migrasi. Terjadinya migrasi tenaga kerja mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berbeda dan ketimpangan fasilitas pembangunan antara satu negara dengan negara lainnya. Para tenaga kerja yang berasal dari negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan pindah ke negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan upah yang lebih tinggi, kondisi lingkungan yang lebih baik, serta lebih banyak kesempatan kerja. Tenaga kerja berfokus pada perbedaan upah dan kondisi kerja antar wilayah atau negara (Noveria, 2017; Puspitasari, 2017).

Tujuan dari bermigrasi adalah untuk mencapai standar hidup yang lebih baik dari daerah asalnya. Penduduk di negara berkembang seperti Indonesia dengan keadaan ekonomi yang serba kekurangan menjadikan migrasi ke luar negeri sebagai alasan untuk mendapatkan pekerjaan. Pengiriman migrasi tenaga

kerja Indonesia selalu dilakukan setiap tahunnya. Terdapat lima provinsi dengan tingkat pengiriman migrasi tenaga kerja paling tinggi, diantaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Grafik 1. Tingkat Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011-2020 (Jiwa)



Sumber: BP2MI 2020

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami fluktuatif. Penempatan migrasi tenaga kerja keluar negeri sebagai salah satu solusi dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan seperti pengangguran. Adanya berbagai masalah dalam negeri seperti lapangan kerja yang minim, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, dan daya saing rendah para pekerja migran menjadikan permasalahan berat yang harus diselesaikan. Adanya permasalahan menjadikan pengiriman tenaga kerja migran sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Volume atau tingkat migrasi yang dikemukakan oleh Lee (1966) berdasarkan teori *Push-Pull Model* dalam *push factor* dan *pull faktor*, menjadikan faktor pendorong sebagai kondisi yang relevan menentukan determinasi tingkat migrasi tenaga kerja keluar Indonesia.

Tinggi rendahnya pengiriman migrasi tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dialami masyarakat maupun negara itu sendiri, diantaranya dipengaruhi oleh banyaknya angkatan kerja dalam Negeri yang juga merupakan pesaing bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Penelitian Befinta

Puspisanti tahun 2014 mengatakan kelimpahan kuantitas tenaga kerja yang tidak dapat diakomodir secara memadai oleh pasar tenaga kerja domestik menuntut mereka untuk mencari peluang kerja lain. Bagi sebagian orang, membuat keputusan migrasi internasional adalah pilihan kerja yang menguntungkan. Berikut jumlah angkatan kerja berdasarkan 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2020:

Tabel 1. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2020 (Jiwa)

Tahun	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Lampung	NTB
2011	19.513.939	19.334.053	17.026.107	3.598.090	2.083.445
2012	20.167.517	20.474.894	17.513.488	3.709.599	2.126.849
2013	20.432.453	20.620.610	17.524.022	3.681.084	2.146.002
2014	20.149.998	21.006.139	17.547.026	3.857.936	2.221.810
2015	20.274.681	20.586.356	17.298.925	3.832.108	2.255.879
2016	19.953.846	21.075.899	17.312.466	4.121.668	2.464.331
2017	20.937.716	22.391.003	18.010.612	4.072.487	2.396.169
2018	21.679.425	22.814.361	18.228.952	4.339.281	2.353.873
2019	21.867.742	23.993.348	18.421.193	4.361.854	2.607.615
2020	22.264.112	24.207.930	18.751.277	4.489.677	2.689.386

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

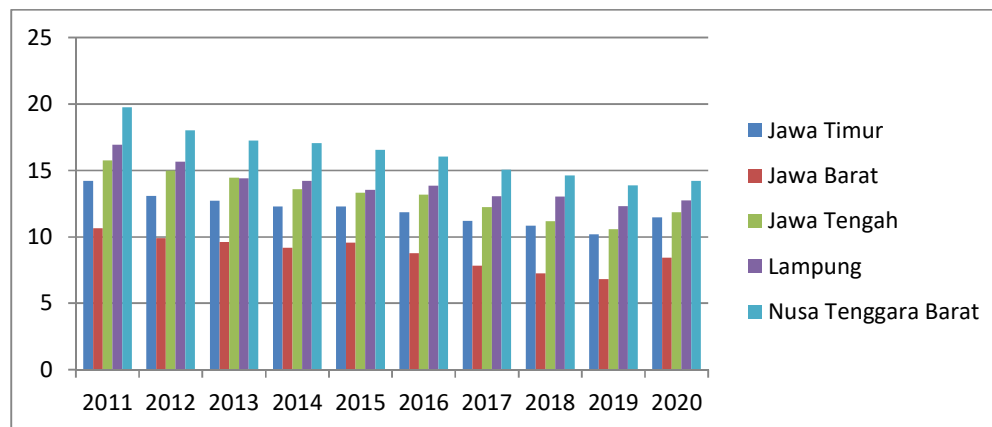
Pada tabel 1 menunjukkan jumlah angkatan kerja cenderung mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Hal ini sebagai bentuk alasan para pekerja migran memutuskan untuk bekerja di luar negeri karena pertumbuhan angkatan kerja tidak dapat mengimbangi lapangan pekerjaan yang tersedia dan industri yang tidak dapat menyerap tenaga kerja dengan maksimal. Namun di masing-masing provinsi terdapat periode yang dimana ketika angkatan kerja meningkat minat migrasi tenaga kerja keluar Indonesia justru menurun, seperti pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014 dilanjut tahun 2018-2020.

Mencakup aspek kehidupan yang semakin berkembang, Indonesia harus mampu mengatasi masalah pembangunan utama yaitu angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang berusaha meningkatkan kesejahteraannya melalui migrasi untuk menjadi pekerja

migran. Penduduk yang mengalami kemiskinan akan mencari jalan keluar dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Teori Malthus menyatakan bahwa ledakan penduduk akan menyebabkan pola hidup yang pas-pasan, hal ini akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Namun, masyarakat yang tidak dapat meningkatkan pendapatannya di dalam negeri akan mencari pendapatan yang lebih tinggi di negara lain, yaitu dengan pindah ke luar negeri dan menjadi pekerja migran.

Berikut ini disajikan presentase penduduk miskin dalam kurun waktu 10 tahun menurut provinsi:

Grafik 2. Presentase Penduduk Miskin 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

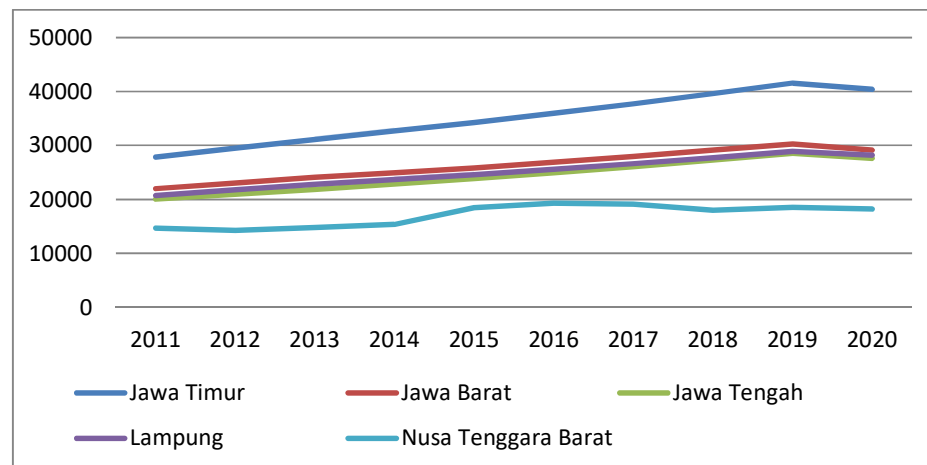
Berdasarkan grafik 2 dapat dikatakan bahwa persentase penduduk miskin pada 5 Provinsi mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lampung merupakan tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi namun pengiriman migrasi yang dilakukan justru lebih sedikit jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan yang rendah namun melakukan pengiriman migrasi dengan jumlah yang tinggi.

Begitu pula perolehan pendapatan suatu daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi PDRB per

kapita suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan dalam pendidikan, kesehatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hukum Okun yang didukung oleh penelitian Wahyu Indah Puspitasari tahun 2017 mengatakan bahwa penduduk di suatu daerah yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang tinggi maka pengiriman tenaga kerja semakin rendah (Puspitasari, 2017).

Berikut adalah tingkat PDRB per kapita yang diperoleh menurut 5 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011-2020 sebagai berikut:

Grafik 3. PDRB Perkapita 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2020 (Rupiah)



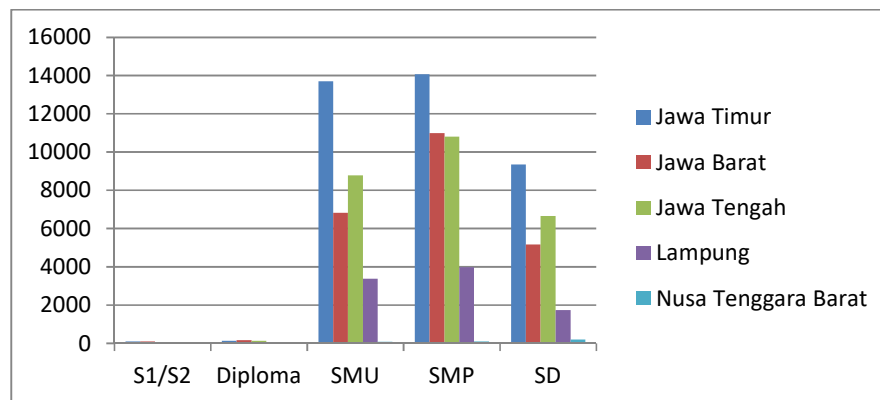
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan pendapatan perkapita di 5 provinsi Indonesia cenderung selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Ketika tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat meningkat maka akan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan migrasi tenaga kerja. Namun, meningkatnya pendapatan per kapita tidak selalu menurunkan tingkat migrasi seperti halnya pada tahun 2016-2018 di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah meningkatnya pendapatan perkapita meningkatkan pula minat migrasi tenaga kerja keluar Indonesia. Begitu pun tahun 2020 pada keseluruhan provinsi yang tingkat pendapatan per kapita menurun, juga menurunkan migrasi tenaga kerja yang ingin

bekerja di luar negeri. Hal ini dikarenakan lumpuhnya pergerakan perekonomian di berbagai negara yang disebabkan oleh pandemi *covid* sehingga terbatasnya akses untuk melakukan kegiatan antar Negara.

Di samping itu latar belakang pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan, karena melalui pendidikan seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diterima maka semakin tinggi pula kualitas *output* yang dihasilkan. Salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas *output* adalah bagaimana *output* tersebut bersaing di lingkungan kerja. Pendidikan yang tinggi ataupun rendah akan menentukan pekerjaan yang akan diperoleh (Arrozi & Sutrisna, 2018).

Grafik 4. Tingkat Pendidikan Formal Migran Tenaga Kerja Indonesia di 5 Provinsi Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang berlatar belakang pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana, pada grafik 4 menunjukkan jumlah tenaga kerja Indonesia dengan tamatan SD dan Sekolah Menengah cukup besar. Migrasi berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di provinsi Jawa Timur sebesar 14.078 jiwa. Adapun Sekolah Dasar sebagai tingkat pendidikan terendah para pekerja migran berasal dari provinsi Jawa Timur sebesar 9.340 jiwa. Dapat diketahui bahwa negara-negara penerimaan migrasi tenaga kerja Indonesia yang ditawarkan melalui para

agen di Indonesia bukan merupakan pekerjaan dengan kebutuhan pendidikan dan keahlian yang tinggi (Rosiana & Fathul Amin, 2019).

Terlihat dari lulusan tingkat pendidikan negara berkembang, pengiriman tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah lebih dominan daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan Ravenstein yang mengatakan bahwa mobilitas seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih banyak bermigrasi, namun teori tersebut tidak berlaku untuk Indonesia.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian Putri Nadya Devita Hermawan (2018) menyebutkan bahwa Pendidikan memiliki hubungan berpengaruh signifikan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bermigrasi. Hal ini dikatakan, bahwa semakin rendah tingkat pendidikan atau semakin pendek lama sekolah akan semakin tinggi jumlah migrasi TKI ke luar negeri. Begitupun sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin rendah pula migrasi TKI yang disalurkan ke luar negeri. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Puspitasari dan Sri Kusreni (2017) mengatakan bahwa Rata-rata Lama Sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut teori Malthus dalam penelitian Wahyu Indah Puspitasari dan Sri Kusreni dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Keluar Negeri Berdasarkan Provinsi di Inonesia (2017) mengatakan bahwa ledakan penduduk akan menciptakan pola hidup serba pas-pasan (subsisten) atau yang disebut model jebakan populasi ekuilibrium tingkat rendah. Ketika taraf hidup yang dialami penduduk dalam keadaan subsisten, atau bahkan lebih rendah dari itu, mereka akan mencari solusi untuk mengubah keadaan tersebut sehingga banyaknya penduduk yang miskin mempengaruhi migrasi tenaga kerja ke luar Indonesia. sedangkan dalam penelitian Moh. Faizin tahun 2020 menyatakan penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia.

Berpijak pada latar belakang penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja keluar Indonesia, yaitu jumlah Angkatan Kerja, Kemiskinan, Pendapatan perkapita, dan Pendidikan

dalam Rata-rata Lama Sekolah. Maka penelitian ini perlu dikaji melalui analisis kuantitatif dengan judul “**Determinan Tingkat Migrasi Tenaga Kerja Keluar Indonesia (Studi Kasus: Provinsi-Provinsi di Indonesia)**”.

I.2 Perumusan Masalah

Pengiriman tenaga kerja keluar Indonesia menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap dilakukan setiap tahunnya. Sebagai bentuk permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja tingkat migrasi mengalami fluktuatif. Hal ini didasari pada keputusan adanya faktor pendorong dari pertumbuhan angkatan kerja di dalam Negeri yang menimbulkan daya saing antar tenaga kerja. Kondisi kebutuhan ekonomi yang serba terbatas menjadi tekanan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun terlihat angka kemiskinan yang terus menurun dan pendapatan per kapita yang mengalami peningkatan namun keputusan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan keputusan yang rasional. Peluang untuk memperoleh pekerjaan diperlukan kemampuan dan kualitas diri yang didasari pada pendidikan, namun pengiriman tenaga kerja Indonesia masih di dominasi oleh lulusan pendidikan yang rendah. Sehingga penelitian ini ingin melihat pengaruh dari angkatan kerja, kemiskinan, pendapatan per kapita, dan pendidikan terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia?
- b. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia?
- c. Apakah PDRB Perkapita berpengaruh terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia?
- d. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Angkatan Kerja terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Kemiskinan terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia.
- c. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh PDRB Perkapita terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia.
- d. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Pendidikan terhadap migrasi Tenaga Kerja Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berbagai kajian-kajian ilmu yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah provinsi-provinsi di Indonesia dalam menentukan kebijakan pengiriman migrasi tenaga kerja keluar negeri.

- 2) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan dasar pengambilan keputusan untuk melakukan migrasi tenaga kerja keluar Indonesia.

- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah referensi bacaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi pembangunan di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.